

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANTAR ANAK
DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada :

**Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

Nama : KUSTRINI
NIM : R100110002

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANTAR ANAK
DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada :
Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
KUSTRINI
NIM : R100110002

Naskah Publikasi ini telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANTAR ANAK DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

ABSTRACT

Kustrini.NIM: R100110002. Solving Criminal Action Decency With *Restorative Justice Approach*. Thesis. Magister Program Muhammadiyah University of Surakarta. 2014.

The children are potential to development and growth to future of country or the other word the children are next generation of country. They must be attention serious from family, society and country and notion. Good or bad of country future determine from the young generation or the children. The children characteristic influences environment, so it cause error action so the action to criminal. To problem solving is special action or restorative justice. Sanction to the children are not same with adult people but with building that education characteristic.

Keywords: Children, Criminal Action Decency between children, applied *Restorative Justice Concept*

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, sebagai salah satu sumber daya manusia sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari lingkungan terdekatnya dan pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Anak yang kurang mendapat perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, jika lingkungan tempat anak tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum.

Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan di muka Pengadilan. Sebagai bagian dari masyarakat, anak mempunyai hak-hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian

serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus, sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :¹

"...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.." Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *"First Call for Children"*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan anak-anak atas *"survival protection, development and participation"*

Di Indonesia telah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap dengan dibuatnya peraturan-peraturan oleh Pemerintah yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substansinyamngatur tentang hak-hak anak, berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dengan dibuatnya Undang-undang tersebut sangat jelas bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Sebagaimana Undang-undang pada umumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan Dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta Hal. 4.

orang tua dan anak, mengingat : (1). Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus di samping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak. (2). Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, di samping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Memperhatikan kenakalan anak remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, yang memprihatinkan apabila kenakalan yang dilakukan bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung pada tindakan kriminal dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penerangan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas para penerus bangsa. Kini banyak kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak dan kenal dengan korban. Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami hal yang sangat serius secara fisik maupun kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki. Sementara itu korban berpotensi mengalami trauma yang cukup parah. Goncangan kejiwaan dapat dialami saat terjadi pelecehan seksual maupun sesudahnya disertai dengan reaksi fisik.

Kejahatan seksual (*sexual crime*) terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak (pelaku) terjadi di banyak negara. Kejahatan seksual terhadap anak-anak terjadi di negara-negara Asia Tenggara, seperti Filipina,

Thailand, Sri Lanka, Malaysia dan Indonesia. Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun, dalam bukunya Sudarsono sependapat dengan Andi Mapiere, yang mengutip Elisabeth B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun.²

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi korban maupun pelaku.

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.³ Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴ Kalau misalnya hukum yang ada (*retributive justice*) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang

² Hosianna Sidabalok, *Artikel 3-Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Hal. 2, Selasa, 20 November 2012.

³ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

⁴ Lihat Bagir Manan "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", *Jurnal Varia Peradilan* No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta Hal. 10.

dialami korban, maka menurut kajian *socialelegal studies*, aparat bukan berarti diam (melakukan pembiaran), tapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan.⁵

Restorative justice pada saat itu memang belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, namun Hakim menerapkannya dalam putusan yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan Hakim tidak bisa menolak perkara yang harus diadilinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:⁶

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Hakim, jika dihadapkan terhadap hal yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas, mempunyai cara untuk menemukannya (penemuan hukum). Hal tersebut juga yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."⁷

Hal yang menarik dan menjadi pertanyaan apakah *restorative justice* ini merupakan hal yang baru atau memang sudah ada dan berjalan dalam sistem hukum di Indonesia? Jika melihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, jelas dan tegas belum ada yang mengatur tentang *restorative justice*. namun melihat dari konsep *restorative justice*, tidak berbeda dengan penyelesaian peristiwa pidana dalam masyarakat hukum adat. ada dua pendekatan penyelesaian peristiwa pidana yaitu aspek magis dan material.⁸ Aspek magis bertalian dengan upaya mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat peristiwa pidana yang diselenggarakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau mengorbankan hewan sebagai "tebusan". Hal yang agak ekstrim adalah sanksi dalam bentuk mengeluarkan atau mengusir pelanggar dari lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.

⁵ Lihat Adji Semekto, "*Kajian Hukum Antara Studi Normatif dan Keilmuan*", Jurnal Hukum Progresif Vol 2 No. 2/Oktobre 2006, Hal. 66.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076

⁷ Ibid

⁸ BagirManan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, (Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 247 Juni 2006), hal. 8

Jika melihat kepada hukum adat, menandakan bahwa *restorative justice* sudah ada dan usianya sudah tua, seperti yang ditulis Eva Achjani Zulfa:⁹

"Bahwa banyak penulis menganggap *restorative justice* bukanlah konsep yang baru. keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan bagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif."

Menurut Eva Achjani Zulfa, "*Restorative Justice*" merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.¹⁰

Restorative Justice diakui oleh dunia Internasional yaitu pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*.¹¹

Menurut Artidjo Alkostar, *Restorative Justice* telah diupayakan diterapkan di berbagai Negara di dunia seperti di United Kingdom, Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika dan Kolombia.¹²

Restorative Justice dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum diatur secara tegas. Menurut Setyo Utomo, tentang pengaturan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan sanksi alternatif baru diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana terdapat konsep *Restorative Justice*.¹³

Konsep *restorative justice* yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dimaksud oleh Andi Hamzah yaitu

⁹Eva Zulfa Achjani, *Restorative Justice Di Indonesia (Peluang Dan Tantangan Penerapannya)*, ditelusur melalui internet <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>

¹⁰ Ibid

¹¹ United Nation, *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000) yang ditelusur melalui internet

www.unicef.org/iac/spbarbados/legal/global/cp/basic%2520restorative%2520justice%2520criminal%20diakses%20tanggal%20..

¹² Alkostar Artidjo, *Urgensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Di Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan dalam diskusi di Mahkamah Agung, Jakarta tanggal 22 Juli 2010.

¹³ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*. (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Nomor 01 Tahun 2011, BPHN), Hal. 137-162.

dilakukan oleh Penuntut Umum atas asas *opportunitas*.¹⁴ Jika Andi Hamzah hanya berbicara sebatas kewenangan Penuntut Umum, maka Surya Jaya berbicara dalam konteks sistem peradilan pidana, *restorative justice* dapat diterapkan.¹⁵

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : (1). Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antar anak? (2). Kapan dan bagaimanakah sebaiknya konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan tindak pidana kesusilaan? (3). Bagaimanakah penyelenggara perlindungan anak di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Anak menurut Suharso dan Ana Retnoningsih adalah turunan yang kedua, manusia yang lebih kecil. Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negara, daerah, dan sebagainya. Anak-anak : anak yang masih kecil (belum dewasa).¹⁶

Pengertian anak juga dikemukakan oleh Haditono sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto dalam bukunya *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarga Putusan MK tentang Uji materiil UU Perkawinan* halaman 6

¹⁴Andi Hamzah, *Restorative Justice Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung", dalam rangka ulah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012.

¹⁵Surya Jaya, *Keadilan Restoratif Tuntutan Dan Kebutuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung", dalam rangka ulah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012

¹⁶Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, 2014. Hlm. 37

menyebutkan anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Di Indonesia aturan hukum mengenai batas usia anak berbeda-beda dan belum ada kesepemahaman atau persamaan baik itu aturan hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum Perdata bisa kita jumpai mengenai batas usia anak yaitu dalam Pasal 330 KUP Perdata menyebutkan: (1). Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah 'belum dewasa' maka sejauh mengenai penduduk Indonesia dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. (2). Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur 22 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. (3). Dalam pengertian tidak termasuk pengertian anak-anak.

Dari Pasal 330 KUH Perdata ayat 1 kita bisa menganalisis bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila sebelum berumur 21 tahun mereka sudah pernah kawin, maka tidak lagi dikategorikan anak-anak karena dianggap sudah dewasa.

Apabila rumah tangga yang dibangun oleh pasangan yang belum berumur 21 tahun tersebut tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian, maka orang tersebut tidak dikategorikan lagi sebagai anak-anak. Jadi dengan kata lain status perkawinan seseorang tidak bisa mengembalikan lagi kepada status anak-anak sebelum mereka kawin.

Mengenai batas usia anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2):

"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Pasal 487 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Dalam aturan hukum pidana bisa dijumpai mengenai kategori anak yang belum dewasa yaitu di dalam Pasal 5 KUHP, Pasal 283 KUHP dan Pasal 287 KUHP.

Pasal 45 KUHP menyatakan *“Dalam memutus orang yang belum cukup umur (minder jarig) karena melakukan perbuatan sebeum umur enam belas tahun.”*

Di dalam pasal 45 KUHP orang dianggap dewasa apabila sudah berumur enam belas tahun.

Pasal 283 KUHP ayat (1): *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya itu telah diketahuinya.*

Kemajuan dalam bidang teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Indonesia dari yang hidup di kota-kota besar sampai pada pelosok pedesaan, dari yang sudah usia senja sampai anak-anak. Semua dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari dunia teknologi.

Teknologi memang di satu sisi membuat dunia ini serasa tanpa batas, namun di sisi lain menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap pola perilaku masyarakat. Pengaruh teknologi bisa menjadikan pelakunya berbuat negatif, sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau dengan kata lain melakukan suatu kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan atau seksual antar anak.

Untuk melindungi masyarakat dari pengaruh kemajuan teknologi tersebut, para pembuat undang-undang tentunya terus berpikir secara serius bagaimana membuat suatu aturan hukum yang bisa mengatasi persoalan tersebut di atas, sehingga apabila terjadi suatu perbuatan atau tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP bisa dijerat dengan undang-undang yang lebih luas.

Peraturan ini tentunya harus mempunyai atau memuat hal-hal yang mencerminkan suatu keadilan baik dilihat dari sisi pelaku, korban maupun saksi.

Di dalam KUHP kita kejahatan kesusilaan atau seksual antar anak belum diatur. Kejahatan terhadap kesusilaan di KUHP diatur di dalam Bab ke XIV buku dari buku ke II KUHP.

Menurut Arif Gosita kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang adanya tidak dapat dihindari, sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Di dalam KUHP Indonesia dikenal dengan istilah kejahatan dan pelanggaran.¹⁷

Pengertian kejahatan menurut Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh Nandang Sambas dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* halaman 23 adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan.¹⁸ Jadi menurut pendapat Emile Durkheim kejahatan akan tetap ada walaupun ada upaya untuk memerangnya.

Menurut M.V.T sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* hlm 71 disebutkan pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtdeliten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kata hukum.¹⁹

Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Menurut Moeljatno seperti telah dikatakan diatas, untuk KUHP kita sekarang sebaiknya adalah bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas berat atau entengnya pidana saja.²⁰

Kejahatan memang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak akan bisa hilang dari muka bumi, baik yang dilakukan individu antar individu, kelompok antar kelompok bahkan negara terhadap negara lain.

¹⁷ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. AkademikaPresindo, Jakarta, 1985 hlm 109.

¹⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 23

¹⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm 71

²⁰ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm 71

SIMPULAN

Dari uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : (1). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seksual antar anak secara umum adalah sebagai berikut : (a). Dipengaruhi oleh kondisi psikis. (b). Pengaruh lingkungan. (c). Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. (d). Menonton film, video porno. (e). Membaca buku bacaan yang bisa membangkitkan rangsangan seksual. (2). Penerapan konsep *Restorative Justice* dilakukan pada saat penyidikan sampai dengan putusan dan dilakukan dengan cara mediasi penal. (3). Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana keasusilaan yang dilakukan oleh anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dengan Penerapan *Restorative Justice*.

SARAN

Dari data yang penulis dapat di lapangan dan kemudian penulis renungkan serta analisis, maka penulis berusaha memberikan solusi atau masukan bagi peradilan di Indonesia dan pembuat kebijakan undang-undang sebagai berikut : (1). Hendaknya pemahaman *restorative justice* ditanamkan pada semua Hakim baik Hakim tingkat pertama, banding sampai Hakim Agung. (2). *Restorative Justice* jangan hanya diterapkan pada peradilan anak saja, tetapi juga pada peradilan umum. (3). Pembuat undang-undang berusaha keras untuk membuat aturan hukum yang benar-benar bisa menjadi payung hukum bagi pelaksanaan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, *Urgensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Di Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan dalam diskusi di Mahkamah Agung, Jakarta tanggal 22 Juli 2010.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1985.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta: 1993.
- Hamzah, Andi, *Restorative Justice Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung", dalam rangka ultah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Tantangan Dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Jaya, Surya, *Keadilan Restoratif Tuntutan Dan Kebutuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung", dalam rangka ultah IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012
- Mahkamah Agung , *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), Hal. 305-345.
- Manan, Bagir, "*Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*", Jurnal Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta.
- Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, (Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 247 Juni 2006).

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Prayitno, Kuart Puji, dalam Makalah “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*”, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, EE-mail: kuat.unsoed@yahoo.com
- Prayitno, Kuart Puji, *Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Semekto, Adji, “*Kajian Hukum Antara Studi Normatif dan Keilmuan*”, Jurnal Hukum Progresif Vol 2 No. 2/Oktobre 2006.
- Shelton, Dinah, *Remedies In International Human Rights Law* (New York, Oxford University Press, 1999) sebagaimana dikutip oleh Artidjo Alkostar, *Restorative Justice*, (Jakarta. Varia Peradilan ke XXII N.262, IKAHI.
- Sidabalok, Hosianna, *Artikel 3-Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Hal. 2, Selasa, 20 November 2012.
- Suharto dan Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya, Semarang. 2014.
- Benard L., Tanya, Simanjutak, Yoan N., Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.
- Benard L., Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.
- Benard L., Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markas Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.
- Tempo, *Undang-Undang Peradilan Anak Disahkan*, <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/03/173414478/Undang-Undang-Peradilan-Anak-DIsahkan>. Wakil Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsudin mengatakan undang-undang ini dibuat guna mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepada nakal yang

berhadapan dengan hukum, "kami ingin ada pendekatan restorative dalam penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga yang berkaitan dengan tindak pidana."

United Nation, *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000) yang ditelusur melalui internet [www.unicef.org/iac/spbarbados/legal/global/cp/basic%2520restorative%2520justice%2520criminal%](http://www.unicef.org/iac/spbarbados/legal/global/cp/basic%2520restorative%2520justice%2520criminal%2520) diakses Selasa, tanggal 13, bulan Mei tahun 2014

Utomo, Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*. (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Nomor 01 Tahun 2011, BPHN).

Hamis Syam, Yunus, *Mendidik Anak Ala Muhammad*, Sketsa. Yogyakarta, 2005.

Zeir Howard, *Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, PA, 2002, sebagaimana dikutip oleh Artidjo Alkostar, *Restorative Justice*, (Jakarta, Varia Peradilan ke XXII N.262, IKAH).

Achjani, Zulfa Eva, (a), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Lubuk Agung, Bandung, 2011).

Achjani, Zulfa Eva, *Restorative Justice Di Indonesia (Peluang Dan Tantangan Penerapannya)*, ditelusur melalui internet <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>